

Relasi Globalisasi dengan Keberhasilan Perjuangan Identitas Amazigh di Maroko

Ahmad Muhammad

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

This paper aimed to explain the prospect of local identity in globalization. The stated main argument is globalization has an important role in reshaping the local identity which have been marginalized rather than erasing the local identity and change it with the global identity (homogenization). In the successful case of Amazigh's identity struggle in Marocco, the Amazigh uses two fitures of globalization; information, communication, and technology (ICT) revolution and discourse externalization. In this matter, the presence of globalization has the big significance in pushing the re-rise of local identity and making the local identity to be more recognized as the product of globalization, unless as "the victim".

Keywords: *globalization, local identity, Amazigh, Marocco government, ICT, discourse externalization.*

Tulisan ini menjelaskan tentang prospek identitas lokal dalam globalisasi. Argumen utama yang disampaikan adalah globalisasi justru mempunyai peranan penting dalam pembentukan kembali identitas lokal yang telah lama termarginalkan daripada menghapus identitas lokal dan menggantikannya dengan identitas global (homogenisasi). Dalam kasus keberhasilan perjuangan identitas Amazigh di Maroko, kaum Amazigh memanfaatkan dua fitur globalisasi; revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan eksternalisasi diskursus. Dalam hal ini, kehadiran globalisasi memiliki signifikansi besar dalam mendorong fenomena kebangkitan kembali identitas lokal dan membuat identitas lokal lebih bisa dipandang sebagai "produk" dari globalisasi, ketimbang sebagai "korban".

Kata-kata kunci: *globalisasi, identitas lokal, Amazigh, pemerintah Maroko, TIK, eksternalisasi diskursus.*

Globalisasi merupakan fenomena yang kerap menunjukkan dua wajah yang saling berkontradiksi. Dalam hubungannya dengan identitas lokal, globalisasi seringkali dituduh bertanggungjawab atas tergerusnya identitas lokal yang digantikan oleh identitas global (homogenisasi) (Holton 2000). Tetapi, pada saat bersamaan globalisasi justru berkontribusi penting dalam mengakselerasi kebangkitan kembali identitas lokal. Sebagaimana sifatnya yang berganda, di samping memberikan ancaman, globalisasi juga sekaligus menyediakan kesempatan bagi identitas lokal untuk menantang hambatan-hambatan yang selama ini merintangai eksistensi mereka. Karena itu prospek keberhasilan perjuangan identitas lokal tergantung pada kejelian para aktivis gerakan identitas lokal dalam memanfaatkan globalisasi.

Fenomena demikian terepresentasikan dalam kasus yang diangkat dalam artikel ini, yaitu mengenai relasi globalisasi dengan keberhasilan perjuangan identitas Amazigh di Maroko. Dengan riwayat selalu mendapat marjinalisasi identitas dari pemerintah Maroko, sejumlah aktivis Amazigh bangkit melakukan perlawanan namun belum membuahkan hasil. Selain kuatnya dominasi pemerintah dalam kehidupan politik Maroko, kegagalan perjuangan identitas disebabkan faktor internal kaum Amazigh Maroko sendiri yang memiliki permasalahan krusial berupa tingkat sentimen identitas yang rendah. Melalui pemanfaatan globalisasi, perjuangan identitas kaum Amazigh Maroko pada akhirnya berbuah kesuksesan, berupa institusionalisasi Tamazight sebagai salah satu bahasa resmi negara, serta dipulihkannya hak-hak kultural kaum Amazigh.

Relasi antara Identitas dan Globalisasi

Menurut Heywood (2011), identitas adalah perasaan kedirian yang tetap dan berkelanjutan serta dimiliki secara personal, komunal, atau universal. Identitas merupakan sumber makna dan pengalaman bagi pemiliknya (Castells 2010a), dan karena itu tak jarang membuat pemilik identitas bersangkutan mempunyai perasaan kepemilikan tidak rasional sehingga tak segan untuk terlibat konflik dengan pihak luar yang dianggap ancaman terhadap identitasnya (Croucher 2003). Pemilik identitas yang terancam, seringkali kemudian melakukan politisasi identitas dengan menggunakannya sebagai titik keberangkatan politik dan mobilisasi massa untuk mengejar kepentingan sosial-politik tertentu (Woodward 1997). Castells (2010a) mengistilahkannya dengan *resistance identity*, yaitu identitas yang digunakan kelompok sosial

sebagai alat perlawanan dari dominasi dan aksi represif yang dipraktikkan pihak luar, khususnya negara. Perlawanan kelompok masyarakat terhadap tekanan negara sering berujung kegagalan, disebabkan oleh baik lemahnya posisi kelompok tersebut serta masih kuatnya dominasi negara. Akan tetapi, kondisi tersebut menemukan prospek cerah dengan adanya globalisasi.

Beberapa sarjana menafsirkan globalisasi sebagai *global interconnectedness* (Held et al 2003), *the borderless world* (Ohmae 1999), *world-wide interconnectedness* (Pieterse 2009), dan *worldwide networks of interdependence* (Nye 2004). Dari beberapa definisi tersebut, bisa dikatakan penanda utama globalisasi mengarah pada satu interpretasi yaitu kesalingterhubungan (interkonektivitas) secara global dan tanpa batas, sehingga menurut Giddens (2002) kejadian lokal bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya, demikian pula sebaliknya. Dalam hubungannya dengan identitas lokal, Tomlinson (2003) melihat bahwa kondisi interkonektivitas dalam globalisasi membuat prospek identitas lokal untuk muncul kembali ke permukaan terbuka lebar. Menurut Smith (2006), hal ini disebabkan globalisasi yang menghubungkan negara dengan berbagai entitas eksternal seperti institusi *supra-state*, perusahaan multinasional, dan organisasi moneter internasional, membuatnya tidak lagi dapat mempertahankan kapasitasnya dalam mendominasi konstruksi identitas nasional. Bagi etnis pribumi yang termarginalkan negara, keterhubungan global ini merupakan kondisi menguntungkan karena mereka tidak saja bisa merumuskan identitas alternatif non-negara seperti etnis pribumi, tetapi juga dapat mengetahui perkembangan dunia luar seperti isu-isu global yang berkembang, dan tentang keberadaan kelompok etnis lain di dunia yang bernasib serupa (Scholte 2005). Selain itu, semakin terpublikasinya eksistensi mereka ke masyarakat internasional, membuat peluang mereka untuk mendapatkan dukungan dari aktor-aktor eksternal terbuka lebar (Tsuitsui 2004).

Selain itu, kondisi interkonektivitas globalisasi memantik masuknya isu-isu global seperti isu HAM, hak-hak masyarakat pribumi, demokrasi, dan rasisme tanpa mampu dibendung negara. Isu-isu tersebut menyebar cepat ke seluruh dunia dan mendapat penerimaan oleh mayoritas masyarakat internasional. Hal ini di antaranya terlihat dari semakin cepatnya perkembangan IGO-INGO yang bergerak di bidang HAM, tingginya tuntutan demokratisasi dalam suatu negara oleh masyarakat, serta semakin menjamurnya gerakan etnis pribumi yang bersifat transnasional (Scholte 1996;2005;Shelton 2002;Smith 2006). Dari

penjelasan di atas, terlihat bahwa globalisasi memiliki kaitan erat dengan kemunculan identitas lokal ke tingkat global. Globalisasi merupakan kendaraan yang digunakan identitas lokal untuk menantang hambatan negara yang selama ini menghalangi mereka (Beck 2000;Smith 2006). Kehadiran globalisasi akan meningkatkan identitas kultural (Yi Wang 2007) dan mendorong kemunculan fenomena kebangkitan kembali lokalitas di tengah arus kultural global (Held & Moore 2007;Giddens 2002). Tidak berlebihan jika Tomlinson (2003) mengatakan bahwa identitas lokal, "...properly understood, is much more the product of globalization than its victim. ...that globalization actually proliferates rather than destroys identities".

Keberhasilan Perjuangan Identitas Amazigh di Maroko

Fenomena yang disebut Hall (1997 dalam Smith 2006) sebagai 'relokalisasi' ini salah satunya tergambarkan dalam kasus keberhasilan perjuangan identitas Amazigh di Maroko. Keberhasilan perjuangan identitas Amazigh di Maroko terepresentasikan pada 1 Juli 2011, ketika pemerintah Maroko melakukan reformasi konstitusional salah satunya berupa institusionalisasi bahasa Amazigh (Tamazight) sebagai bahasa resmi negara, bersanding dengan bahasa Arab. Dalam artikel 5 konstitusi 2011 dinyatakan:

Tamazight [Berber/amazighe] constitutes an official language of the State, being common patrimony of all Moroccans without exception. An organic law defines the process of implementation of the official character of this language, as well as the modalities of its integration into teaching and into the priority domains of public life, so that it may be permitted in time to fulfill its function as an official language.

(Marocma 2013)

Dengan pengakuan ini, maka identitas Amazigh mendapatkan kedudukan setara dengan Arab, yaitu sebagai salah satu komponen penyusun identitas nasional Maroko (Masbah 2011). Implementasi dari pengakuan ini di antaranya; integrasi Tamazight ke dalam sistem pendidikan dan administrasi negara, penghapusan larangan registrasi nama anak Amazigh, serta pemasangan markah jalan dan simbol negara menggunakan Tamazight (El-Kaidi 2013).

Pengakuan ini merupakan prestasi istimewa bagi perjuangan etnis Amazigh di Maroko. Pasalnya, sebagai pribumi (estimasi 30-40% dari total populasi) di Maroko, kaum Amazigh dalam kurun waktu lama mengalami diskriminasi oleh pemerintah melalui proyek Arabisasi (Amazighworld 2013). Proyek Arabisasi dijalankan pemerintah setelah kemerdekaan dengan memproklamirkan Maroko sebagai negara Arab yang berbahasa dan berbudaya Arab. Konsekuensinya, identitas Amazigh dalam posisi subordinat dan menjadi warga negara kelas dua di negara mereka sendiri (Mondeberbere 2002). Marjinalisasi identitas Amazigh berlangsung secara struktural, sistematis, dan multidimensional, meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosio-kultural. Misalnya, kebijakan perekrutan pegawai pemerintahan yang rasialis, pelarangan registrasi nama Amazigh kepada anak-anak, serta keharusan penggunaan bahasa Arab dalam sistem pendidikan, pengiriman guru-guru Arab di area mayoritas Amazigh, penulisan dokumen resmi dan penyiaran media massa (Prengaman 2001; Temehu 2013).

Menghadapi serangkaian diskriminasi tersebut, etnis Amazigh berusaha melakukan perlawanan. Fase perjuangan etnis Amazigh setidaknya dapat diklasifikasikan dalam beberapa fase. Pertama, sebelum dasawarsa 1990-an. Sepanjang fase yang berlangsung sejak kemerdekaan Maroko tahun 1956, perlawanan yang dilakukan kaum Amazigh masih bersifat lokal, sporadis, dan kebanyakan memilih jalur kekerasan, seperti dalam pemberontakan di Tafilalt tahun 1957, di Rif tahun 1958-1959, dan di pegunungan Atlas Tengah tahun 1960. Tetapi perlawanan tersebut dengan mudah dipatahkan negara (Ilahiane 2006, xxxvi; Weitzman 2011). Sejak akhir 1970-an, segelintir kalangan terdidik Amazigh mulai mengubah haluan perjuangan melalui wadah asosiasi kultural untuk mengampanyekan hak-hak yang lebih besar bagi kaum Amazigh (Temehu 2013).

Tetapi upaya ini pun belum berhasil menarik perhatian masyarakat luas (Sater 2007). Hal ini wajar, mengingat fase tersebut masih ditandai lemahnya sentimen identitas di kalangan kaum Amazigh sendiri. Kaum Amazigh jarang menyadari identitas Amazigh mereka karena lebih memberikan loyalitas identitas kesukuan lokal (seperti Shuluh, Kabyle, Souss) atau bahkan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari identitas Arab. Selain itu, diskursus Amazigh pada masa itu belum menyentuh seluruh lapisan kaum Amazigh dan terbatas pada kalangan urban-intelektual (Elasisati 1993; Crawford & Hoffman 2000; Weitzman 2011). Permasalahan lainnya, sepanjang fase tersebut para aktivis Amazigh

ditangkap atau 'dihilangkan' serta surat kabar, buku, dan majalah yang memuat isu Amazigh diberedel dan dibakar (HRW 2004).

Pada fase kedua setelah arus globalisasi mengalir deras dekade 1990-an, serangkaian kemajuan diskursus Amazigh mulai terjadi. Pada 5 Agustus 1991, enam kelompok asosiasi kultural Amazigh bertemu di Agadir, Maroko, dan menandatangani *Agadir Charter* yang berisi tuntutan komunitas Amazigh untuk diberikan penghormatan dan pengakuan atas identitas kultural mereka (Amazighworld 2013). Selain itu, mulai periode ini gelanggang perjuangan komunitas Amazigh meluas ke panggung internasional dengan keterlibatan aktor-aktor eksternal dalam diskursus Amazigh (Cornwell & Smith 2010). Maret 2000, perjuangan Amazigh diwujudkan dalam *Berber Manifesto*, sebuah petisi yang ditandatangani ratusan aktivis, akademisi, pengusaha, artis, dan birokrat yang menuntut pengakuan hak-hak politik dan kultural, pendirian lembaga kebudayaan Amazigh dan memasukkan unsur-unsur Amazigh dalam sejarah Maroko di buku pelajaran. Sebagai respon, Raja Mohammed VI mendirikan Royal Institute for Culture Amazigh (IRCAM), lembaga pelestarian budaya Amazigh yang didanai negara pada 17 Oktober 2001 dan berjanji untuk mulai mengajarkan Tamazight dalam pendidikan (Cohen & Jaidi 2006). Kemajuan perjuangan Amazigh berkulminasi pada 1 Juli 2011, ketika Raja Mohammed VI melakukan reformasi konstitusi yang mengakui Tamazight sebagai salah satu bahasa resmi Maroko dan merevitalisasi hak-hak kultural Amazigh (Temehu 2013).

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa interkonektivitas global memiliki signifikansi besar dalam mempromosikan identitas lokal. Hal ini dimanfaatkan kelompok etnis untuk mengakselerasi perjuangan mereka di panggung global. Dalam kasus ini, dua fitur dalam globalisasi yang membantu kebangkitan identitas lokal Amazigh adalah revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan eksternalisasi diskursus. Kedua fitur tersebut memberikan kesempatan kaum Amazigh tidak saja untuk menumbuhkan sentimen identitas di antara kaum Amazigh sedunia, tetapi juga memperluas diskursus Amazigh ke arena global serta menarik keterlibatan aktor-aktor eksternal.

Optimalisasi Fungsi TIK oleh Kaum Amazigh

TIK merupakan simbol globalisasi karena kemampuannya dalam memfasilitasi pergerakan arus informasi, modal, barang, dan jasa secara

global dan lintas batas teritorial (Castells 2010b). Castells mengilustrasikan fenomena ini dalam konsep *space of flows* (ruang arus), yaitu sebuah dunia di mana mobilitas dan koneksi jaringan menjadi fitur utama (Castells 2010b). Fenomena ini kemudian memunculkan informasionalisme dan masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang terhubung oleh jaringan informasi yang mengalir bebas dan tanpa batas (Castells 2010a). Dalam masyarakat jaringan saat negara kesulitan mengontrol, arus informasi leluasa mengalir secara global (Held et al 1999), menyediakan kapasitas untuk membangun lingkungan simbolik baru, serta dapat mentransformasikan virtualitas menjadi realitas tanpa terbatas oleh hambatan-hambatan geografis dan waktu (Castells 2010a).

Mengalirnya arus-arus global tanpa mampu dibendung negara memberi pengaruh signifikan kepada masyarakat lokal (Tomlinson 2007). Hal ini kemudian memunculkan gerakan masyarakat yang aktif mengkonstruksi 'identitas' mereka berdasarkan atribut kultural tertentu (Castells 2010a). Konstruksi identitas tersebut terbentuk dalam jaringan dan bersifat *deterritorialized*, dalam artian identitas didefinisikan dalam bentuk baru yang lintas batas geografis (Delanty & Rumford 2007; Tomlinson 2003). Pada perkembangannya, batas-batas identitas lama (seperti nasionalisme) yang secara eksklusif terikat pada ruang geografis dibongkar (*de-bordering*) dan dikonstruksi kembali (*rebordering*) berdasarkan kategori-kategori baru *non-places* seperti etnik. Batas-batas baru ini, direproduksi dan disebarluaskan oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dan terikat ke dalam batas-batas tersebut (Balibar 1998). Dari sini, keberadaan TIK bisa menjadi sarana efektif bagi perjuangan identitas kelompok etnis, terutama ketika dominasi negara masih sulit ditandingi di dunia nyata. Situasi pemerintah yang kewalahan membendung arus informasi di internet, dimanfaatkan kelompok etnis untuk memproduksi identitas versi mereka dan mempromosikan tidak hanya kepada masyarakat mereka, namun juga kepada dunia internasional (Held & McGrew 2003). Dengan catatan menjaga dan memutakhirkan laman-laman internet mereka, potensi kelompok etnis untuk memenangkan perjuangan terbuka lebar (Wardhani 2010), karena menurut Castells (2010a), pemenang pertarungan di era globalisasi ini adalah mereka yang mengendalikan informasi melalui pemanfaatan '*new media*'.

Dalam kasus perjuangan identitas Amazigh, potensi kekuatan TIK disadari oleh kaum Amazigh dan karena itu mereka mengoptimalkan pemanfaatannya. Menurut penulis, pemanfaatan TIK oleh kaum Amazigh mengambil beberapa bentuk. Pertama, sebagai jalan alternatif

di tengah ketatnya kontrol pemerintah terhadap segala publikasi yang beraroma Amazigh di ruang publik. Kedua, sebagai instrumen penumbuh kesadaran identitas, memperluas jaringan, serta menyamakan visi dan misi di antara kaum Amazigh di skala internasional. Ketiga, sebagai alat promosi, penarik simpati dan dukungan untuk meyakinkan masyarakat internasional terkait distingsi identitas mereka dengan Arab dan permasalahan marjinalisasi identitas yang mereka hadapi di Maroko. Upaya ini diharapkan dapat mendorong dunia internasional untuk membantu perjuangan mereka dengan menekan pemerintah Maroko.

Komunitas virtual Amazigh di dunia maya pertama kali dibentuk pada Juli 1992, tak lama setelah era internet *booming* melalui *mailing-list* Amazigh-net. Komunitas yang terdiri dari beragam anggota dari berbagai kelas, pekerjaan, warga negara, dan bahasa, berkontribusi besar membentuk kesadaran identitas di antara komunitas Amazigh di seluruh dunia (Almasude 1999). Melalui Amazigh-net, untuk pertama kalinya berbagai kelompok Amazigh di seluruh dunia mulai melihat diri mereka terintegrasi ke dalam satu komunitas, yaitu bagian dari identitas Amazigh secara keseluruhan (Crawford & Hoffman 2000). Amazigh-net merupakan cikal bakal berkembangnya perjuangan identitas Amazigh di dunia maya. Setelah era Amazigh-net, bermunculan puluhan situs Amazigh yang meneruskan jejak perjuangannya. Situs-situs tersebut bervariasi, sebagian didirikan oleh asosiasi Amazigh skala nasional, sebagian dibentuk kaum Amazigh diaspora di Eropa dan Amerika Utara, dan sebagian lagi merupakan situs yang didirikan asosiasi Amazigh internasional. Penyebaran informasi tentang Amazigh juga dilakukan melalui TV dan radio. Tamazight-tv.ma, dan alidaa-alamazighia.ma merupakan TV dan radio online pertama dari Maroko yang menampilkan program-program siarannya dengan bahasa Tamazight.

Menariknya, di antara situs-situs Amazigh yang tersebar di internet, hampir selalu menautkan diri dengan situs Amazigh lain yang dapat dikunjungi. Hal ini secara tidak langsung akan menarik pengunjung suatu situs untuk mengakses informasi lebih luas terkait Amazigh, sekaligus memudahkan promosi identitas Amazigh kepada dunia internasional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sentimen identitas Amazigh di seluruh dunia telah semakin kuat terbentuk. Mereka seperti memiliki rasa kepemilikan identitas dan visi sejalan, untuk bersama-sama memperjuangkan identitas Amazigh. Dari sini dapat dilihat bahwa TIK merupakan instrumen penting terhadap keberhasilan

perjuangan kaum Amazigh. Dalam hal ini kaum Amazigh tidak saja telah melakukan deteritorialisasi, keluar dari batas-batas identitas nasional Maroko, tetapi juga mendorong kepada reteritorialisasi; menggambar ulang batas-batas tersebut berdasarkan satu imajinasi tunggal dan solidaritas trans-nasional Amazigh. Wujud dari implementasi identitas tunggal Amazigh tersebut terlihat dari tersebarnya simbol-simbol citra diri Amazigh dalam bentuk bendera, bahasa, dan abjad khas kaum Amazigh dalam hampir semua medium informasi Amazigh seperti laman internet, TV dan radio.

Eksternalisasi Diskursus Amazigh

Sementara itu fitur lain dalam globalisasi yang membuka kesempatan bagi kelompok etnis untuk bangkit adalah eksternalisasi diskursus. Eksternalisasi terjadi jika aktor-aktor internasional terlibat dalam diskursus kelompok etnis (Wardhani 2011). Di antara aktor-aktor eksternal yang terlibat dalam persoalan etnis adalah diaspora, yang eksistensinya dikatakan oleh Shain & Wittes (2002) bersifat endemik dan tak terelakkan, serta menjadi fitur konstitutif dalam lanskap politik kontemporer (Silverstein 2004). Dengan kebebasan yang dimilikinya di tanah rantau serta kedekatan emosional dengan kelompok etnis di tanah asal, memungkinkan diaspora untuk menyuarakan dukungan untuk perjuangan 'saudara etnis' mereka, membangun jaringan transnasional dengan kelompok sesama etnis di seluruh dunia, melakukan kampanye dan lobi ke masyarakat internasional serta memberi tekanan signifikan terhadap pemerintah di negara asal (Wardhani 2010). Selain itu sifat operasi kelompok diaspora yang independen dari setiap individu negara (baik negara tanah air mereka atau negara tuan rumah) memungkinkan diaspora untuk terlibat langsung dengan negara pihak ketiga atau organisasi internasional (Shain & Wittes 2002).

Aktor eksternal lain yang dapat memengaruhi kebijakan negara adalah NGO internasional (INGO), yang berperan memantau dan mengadvokasi penerapan nilai-nilai HAM di suatu negara secara berkala, bersuara ketika menemukan pelanggaran HAM negara kepada kelompok etnis tertentu serta mengirimkan laporan kepada negara bersangkutan agar segera menghentikannya, menggalang dukungan internasional untuk mencegah pelanggaran HAM, dan mengucilkan negara pelanggar HAM dari pergaulan internasional (Wardhani 2010). Sementara peranan aktor IGO terlihat di antaranya; (1) simpati IGO terhadap kelompok etnis secara tidak langsung akan memberikan

legitimasi terhadap gerakan mereka, (2) menaikkan moral para pemimpin gerakan, (3) menyediakan forum untuk mendapat *audience* yang lebih luas sehingga dapat menggiring opini publik internasional untuk memihak mereka, (4) menekan pemerintah untuk menginisiasi negosiasi politik dengan kelompok etnis dan merumuskan solusi keluar dari kebuntuan (Phadnis & Gangguly 2001).

Terkait dengan strategi yang dapat ditempuh kelompok etnis dalam upayanya menarik dukungan aktor eksternal, menurut Wardhani (2010) adalah dengan *visibility* (kualitas agar dapat dilihat) dan *audibility* (derajat untuk bisa didengar). Perhatian dan dukungan masyarakat internasional akan mengalir apabila kelompok etnis dapat memastikan diri selalu *visible* dan *audible* di mata dunia. Dalam hal ini, kejelian dalam menampilkan diri sebagai kelompok yang mengalami marjinalisasi identitas diperlukan untuk memperbesar kemungkinan dukungan aktor eksternal mengalir kepada mereka sehingga memberikan tekanan besar kepada negara (Wardhani 2010). Dengan demikian, pemanfaatan aktor eksternal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perjuangan etnis.

Upaya eksternalisasi diskursus Amazigh merupakan elemen penting bagi keberhasilan perjuangan mereka karena aktor-aktor eksternal memiliki kemampuan besar yang dapat digunakan untuk menekan pemerintah Maroko. Untuk itu kaum Amazigh berusaha memposisikan diri agar terus berada dalam tatapan mata dunia internasional. Implementasinya, pertama, melalui promosi identitas Amazigh ke seluruh dunia. Hadirnya publikasi masif tentang Amazigh dapat membuka mata dunia bahwa penduduk pribumi di sebagian besar wilayah Afrika Utara adalah kaum Amazigh, bukannya Arab, dan bahwa mereka kerap mendapat marjinalisasi dari etnis Arab. Promosi identitas Amazigh dilakukan melalui berbagai cara seperti pembentukan asosiasi kultural, penyelenggaraan festival musik, film, dan budaya Amazigh, publikasi buku, majalah dan jurnal, serta pendirian perpustakaan dan pusat studi Amazigh di luar negeri, khususnya negara-negara Barat.

Salah satu aktor yang berperan penting dalam menjalankan misi ini adalah diaspora Amazigh, khususnya di Eropa dan Amerika Utara yang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa (Weitzman 2011). Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan asosiasi kultural Amazigh. Di Eropa dan Amerika Utara, bermunculan puluhan asosiasi Amazigh. Organisasi pertama Amazigh diaspora berada di Paris, dengan

pembentukan Academie Berbere pada tahun 1967 dan Groupe d' Etudes Berberes (GEB) pada tahun 1973 (Silverstein 2004, Weitzman 2011). Di Belanda, pembentukan asosiasi Amazigh pertama baru terjadi tahun 1990, dengan pendirian asosiasi "Izaouran" di Amsterdam, dan diikuti asosiasi Amazigh lain, seperti 'Tifawt' di Den Haag, 'Nekour' di Gouda, 'Adrar' di Nijmegen, dan di Utrecht, 'Apuleius', dan 'Syphax' (Karrouche 2013). Sedangkan di New Jersey, Amerika berdiri Asosiasi Budaya Amazigh di Amerika (ACAA). Secara umum tujuan pendirian asosiasi Amazigh di Barat adalah untuk menyelamatkan, mempromosikan bahasa dan budaya Amazigh sehingga membuat masyarakat luas sadar dan menaruh perhatian terhadap sejarah dan peradaban Amazigh.

Kelompok diaspora Amazigh menggunakan berbagai media untuk mempromosikan identitas mereka. Di antaranya dengan menerbitkan buletin, seperti 'Adrar Niewbrief', buletin tiga bulanan yang diterbitkan oleh asosiasi 'Adrar' dari tahun 1995 dalam bahasa Belanda, Tamazight dan Perancis. Asosiasi Syphax menerbitkan 'Rif Bulletin', dan 'Tabrat' sejak tahun 1998 (Karrouche 2013). Sementara diaspora di AS menerbitkan majalah 'The Amazigh Voice', yang beredar sejak 1997 (ACAA 2014). Academie Berbere di Perancis menerbitkan majalah bulanan yang didistribusikan di Perancis, Aljazair, dan Maroko. Asosiasi lain di Perancis, menerbitkan jurnal studi Amazigh, 'Awal' di Paris (Bengio & Weitzman 2013). Kontributor utama majalah dan buletin Amazigh di Eropa terutama para sarjana, aktivis dan seniman Amazigh dari Maroko, Belanda dan Perancis. Pembaca juga diberitahu tempat di mana mereka dapat menemukan majalah serupa di negara-negara lain (Karrouche 2013).

Upaya-upaya tersebut diikuti dengan pendirian pusat-pusat studi Amazigh. Inisiatif ini terealisasi dalam pembentukan pusat studi Amazigh di Perancis, seperti "Berber Academy Paris", "the centre de Recherche Berbere Institut National des Langues et Civilisations Orientales" (INALCO) Paris dan Pusat Studi Amazigh di University of Paris-VII-Vincennes (Lourmen 2009). Sementara upaya yang diinisiasi oleh The Groupe d' Etudes Berberes memperoleh legitimasi intelektual dari akademi Perancis untuk membuka studi bahasa dan budaya Amazigh, serta menarik simpatian dari kalangan akademisi, termasuk para intelektual terkemuka seperti Ernest Gellner, Pierre Bourdieu, Germaine Tillion dan Lucette Valensi (Bengio & Weitzman 2013). Di Amsterdam, diaspora Amazigh Belanda mendirikan De Berberbibliotheek, perpustakaan yang dikhususkan mengoleksi

berbagai literatur tentang Amazigh (Karrouche 2013). Tak ketinggalan tahun 1993, di California, Amerika Serikat, berdiri Tazzla Institute, sebuah institut etnologi yang gencar mengkaji dan mempromosikan budaya Amazigh ke masyarakat internasional. Dalam aktivitasnya, ia menjalin kerjasama dengan banyak pihak, termasuk PBB, NGO, serta jaringan Amazigh di seluruh dunia (Tazzla 2013).

Penyelenggaraan festival budaya merupakan cara lain dalam memperkenalkan identitas Amazigh ke khalayak lebih luas. Pada kesempatan tersebut, dideklarasikan kesepakatan bersama seluruh partisipan yang menuntut pengakuan linguistik dan kultural bagi masyarakat Amazigh di wilayah Tamazgha (dari Kepulauan Canary di barat ke Oasis Siwa [Mesir] di timur, dari Mediterania di utara ke Burkina Faso di selatan). Mereka juga meminta pemerintah negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam mengakui identitas Amazigh, baik secara konstitusional, kultural, dan linguistik. Deklarasi tersebut kemudian diikuti dengan proklamasi rancangan pendirian Kongres Amazigh Dunia (CMA), organisasi jaringan kaum Amazigh sedunia, dan salah satu aktor Amazigh internasional yang nantinya memainkan peran krusial dalam perjuangan identitas Amazigh di panggung global (Weitzman 2011).

Kedua, penguatan sentimen identitas dan solidaritas di antara kaum Amazigh di seluruh dunia melalui pembentukan jaringan Amazigh Internasional. Kongres Amazigh Dunia (World Amazigh Congress, *Congres Mondial Amazigh [CMA]*), yang dibentuk sebulan setelah festival di Doumenez, tanggal 1-3 September 1995 di Saint-Rome de Dolan, selatan Perancis, melibatkan sekitar 100 delegasi yang mewakili 38 asosiasi Amazigh di Afrika Utara dan diaspora. Organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah persatuan perjuangan kaum Amazigh di seluruh dunia, beroperasi sebagai kelompok lobi trans-nasional dalam mendukung hak-hak Amazigh, terutama hak linguistik dan kultural di negara-negara Afrika Utara. Konsekuensi positif dari eksistensi CMA adalah pada akhir 1990-an, terjadi peningkatan luar biasa dalam jumlah asosiasi Amazigh, dari sekitar enam pada tahun 1990 menjadi hampir 200 asosiasi pada tahun 2000. Kebanyakan mereka telah mengorganisir diri dalam CMA, mendorong reformasi politik mengenai pengakuan Tamazight sebagai bahasa resmi dan penulisan ulang sejarah Maroko dengan menyertakan peranan Amazigh di dalamnya (Sater 2007).

Ketiga, kaum Amazigh memanfaatkan identitas Amazigh dan memainkannya di hadapan masyarakat internasional. Pemanfaatan

identitas yang dimaksud adalah menarik garis demarkasi tegas antara identitas Amazigh (berupa simbol, tradisi, dan praktik-praktik identitas) yang berbeda dengan identitas Arab dan menampilkan diri di mata dunia sebagai kelompok yang mengalami ketertindasan identitas. Citra diri sebagai kelompok tertindas dan bahwa penindasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti demokrasi, HAM, termasuk hak-hak masyarakat pribumi, lebih mudah menarik dukungan aktor-aktor eksternal untuk menekan pemerintah Maroko, atas dasar bahwa pemerintah Maroko tidak menaruh respek mendalam terhadap norma-norma yang telah menjadi kesepakatan masyarakat internasional.

Hal ini dilakukan melalui partisipasi kaum Amazigh di berbagai forum internasional. Para aktivis CMA merupakan salah satu aktor penting dalam mengeksekusi strategi ini. Mereka membangun jaringan kerja sama dengan berbagai IGO, INGO maupun entitas internasional lain dan memanfaatkannya sebagai instrumen penekan pemerintah Maroko. Misalnya, aktivis CMA mengadakan pertemuan di Paris pada bulan November 2000, memberikan rekomendasi kepada Uni Eropa agar Piagam Eropa untuk Bahasa Regional atau Minoritas dapat diadopsi dan diterapkan di dalam semua negara (Weitzman 2011).

Maret 2009, Rachid Raha anggota CMA, mengajukan banding ke Parlemen Eropa dan mendesak untuk mencabut 'status tingkat lanjut' yang diberikan kepada Maroko pada tahun sebelumnya. Ia merinci serangkaian kebijakan diskriminatif, "apartheid anti-Amazigh" yang diambil pemerintah Maroko. Agustus 2010, sejumlah organisasi Amazigh seperti Tamaynut, CMA dan the Amazigh Network for Citizenship (AZETTA) mengirimkan laporan kepada Komite untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial (CERD) di Jenewa. Dalam laporan tersebut, selain memaparkan bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah Maroko kepada etnis Amazigh, organisasi ini merekomendasikan CERD untuk meminta pemerintah Maroko meminta maaf atas kebijakan rasialis-diskriminatif yang diadopsi sejak kemerdekaan, mengakui dan mempromosikan eksistensi etnis Amazigh, dalam hal identitas, bahasa, budaya, serta reformasi konstitusi negara, salah satunya dengan menempatkan Tamazight sebagai bahasa resmi negara. Sementara asosiasi diaspora Amazigh di Amerika (ACAA), pada 2008, bersama beberapa aktivis Amazigh di Maroko mengirimkan laporan ke lembaga internasional seperti Human Right Watch (HRW) dan Amnesty International (AI) mengenai diskriminasi rasial yang menimpa etnis Amazigh di Maroko, khususnya

terkait pencekalan kaum Amazigh untuk mendaftarkan nama anak mereka menggunakan nama Amazigh. Sebagai respon, HRW mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri Maroko, Benmoussa terkait undang-undang catatan sipil Maroko.

Perjuangan kaum Amazigh juga beroperasi di skala regional. Pada 21-23 Januari 2000, sebanyak 55 organisasi Amazigh di negara-negara Afrika Utara dan Barat untuk pertama kalinya berkumpul dalam seminar regional tentang hak-hak masyarakat pribumi. Pertemuan tersebut mendeklarasikan bahwa pengakuan konstitusional terhadap hak-hak budaya, peradaban, dan identitas linguistik masyarakat pribumi harus dikonfirmasi, dan bahwa bahasa ibu harus dimasukkan ke dalam pendidikan dan media. Urgensi seminar ini terletak pada pertemuan langsung asosiasi budaya Amazigh di Afrika dalam membela hak asasi manusia (IWGIA 2001). Upaya lain kaum Amazigh di tingkat regional adalah bekerjasama dengan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (ACHPR). Dalam laporannya ke lembaga tersebut dan ILO tahun 2009, asosiasi Amazigh menyatakan bahwa marjinalisasi hak-hak linguistik dan kultural di Maroko merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan Piagam Afrika. Sebagai respon, ILO dan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Masyarakat merekomendasikan pemerintah Maroko untuk segera mengakhiri marjinalisasi diskriminatif terhadap kaum Amazigh dan budaya mereka (ILO & ACHPR 2009).

Simpulan

Globalisasi tidak selalu menghapus identitas lokal dan digantikan oleh identitas global (homogenisasi). Sebaliknya, globalisasi juga berdampak positif dengan kemampuannya menyemai identitas lokal yang selama ini termarjinalkan penguasa. Globalisasi seperti memberikan kesadaran baru bagi masyarakat lokal dalam menumbuhkan rasa kepemilikan mereka terhadap identitas lokal mereka. Selain itu, globalisasi juga berperan dalam melipatgandakan kekuatan identitas lokal dalam upayanya lepas dari marjinalisasi negara. Kasus Amazigh di Maroko di atas menjelaskan bahwa globalisasi berperan penting terhadap keberhasilan perjuangan identitas lokal. Dalam kasus tersebut, dua fitur globalisasi yang berperan penting dalam keberhasilan perjuangan identitas Amazigh di Maroko adalah TIK dan eksternalisasi diskursus. TIK berperan selain sebagai jalan keluar alternatif dari ketatnya kontrol pemerintah yang melarang segala publikasi tentang Amazigh, juga

sebagai ruang rekonstruksi identitas, forum konsolidasi, dan sebagai tempat promosi identitas Amazigh ke seluruh dunia. Sementara upaya eksternalisasi diskursus yang dilakukan kaum Amazigh digunakan untuk mempromosikan identitas Amazigh ke seluruh dunia, sebagai wadah penguatan sentimen identitas dan solidaritas antar kaum Amazigh sedunia melalui pembentukan jaringan Amazigh Internasional, serta menarik keterlibatan aktor-aktor eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perjuangan identitas lokal Amazigh tidak dapat dilepaskan dari peran penting globalisasi, dan bahwa kebangkitan identitas lokal, dapat dipandang sebagai 'produk' dari globalisasi, ketimbang sebagai 'korban' globalisasi sebagaimana biasa dipahami.

Daftar Pustaka

Buku dan Bab dalam Buku

- Balibar, E., 1998. *The Borders of Europe*, dalam Cheah, Pheng & Bruce Robbins (eds.). *Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation*. Minneapolis: Univesity of Minnesota Press.
- Beck, Ulrich, 2000. *What Is Globalization*. Polity Press.
- Castells, Manuel, 2010. *The Power of Identity*, Second Edition. UK: Blackwell Publishing.
- _____, 2010. *The Rise of the Network Society*, Second Edition. UK: Blackwell Publishing.
- Cohen, Shana & Laribi Jaidi, 2006. *Morocco: Globalization and Its Consequences*. New York, NY: Routledge.
- _____, 2004. *Searching For a Different Future: The Rise of a Global Middle Class in Morocco*. London: Duke University Press.
- Croucher, Sheila L, 2003. *Globalization and Belonging: The Politics of Identity in a Changing World*. New Millennium Books in International Studies. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.

- Delanty, Gerard & Chris Rumford, 2007. "Political Globalization", dalam Ritzer, George (ed.), *The Blackwell Companion to Globalization*. USA: Blackwell Publishing, pp.414-429.
- Giddens, Anthony, 2002. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Held, David & A. McGrew, 2003. *The Global Transformations Reader : an Introduction to the Globalization Debate*. UK: Polity Press.
- Held, David & Henrietta L. Moore, 2007. *Cultural Politics in a Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation*, Oxford: Oneworld.
- Held, David et. al., 1999. "Globalization", dalam *Global Governance*, 5 (4), pp. 483-496.
- _____, 2003. "Rethinking Globalization", dalam *The Global Transformations Reader : an Introduction to the Globalization Debate*. UK: Polity Press, pp. 67-75.
- Heywood, Andre, 2011. "Identity, Culture and Challenges to the West" dalam *Global Politics*, New York: Palgrave Foundation.
- Holton, Robert, 2000. "Globalization's Cultural Consequences", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 570, pp.140-152
- Ilahiane, Hsain, 2006. *Historical Dictionary of the Berbers (Imazighen), Historical Dictionaries of Peoples and Cultures, No. 5*. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland.
- Nye, Joseph S, Jr., 2004. *Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization*, New York: Routledge.
- Ohmae, Kenichi, 1999. *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*. New York : Harper Business.
- Phadnis, Urmila & Rajat Gangguly, 2001. *Ethnicity and Nation Building in South Asia*. California : Sage Publication.
- Pieterse, J. Nederveen, 2009. *Globalization and Culture: Global M lange* (2nd ed.). New York :
- Sater, James N, 2007. *Civil Society and Political Change in Morocco*. London and New York : Rotledge.
- Scholte, Jan Aart, 1996. The Geography of Collective Identities in a Globalizing World, *Review of International Political Economy*, 3 (4), pp. 565-607.
- _____, 2005. *Globalization: A Critical Introduction*, Second Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Shain, Yossi & Tamara Cofman Wittes, 2002. "Peace as a Three-Level Game: The Role of Diasporas in Conflict Resolution", dalam Ambrosio, Thomas (ed.). *Ethnic Identity Groups and US Foreign Policy*. Westport, CT: Praeger Publishers.

- Silverstein, Paul, 2004. *Algeria in France*. Bloomington, IA: University of Indiana Press.
- Smith, Keri Iyall, 2006. *The State and Indigenous Movements*. New York : Routledge, Taylor & Francis Group.
- _____, 2003. "Globalization and Cultural Identity." dalam Held, David & A. McGrew (eds.), 2003. *The Global Transformations Reader : an Introduction to the Globalization Debate*. UK: Polity Press, pp. 269-278.
- _____, 2007. "Globalization and Cultural Analysis". dalam David Held & A. Macgrew (eds.). *Globalization Theory: Approaches and Controversies*. Cambridge: Polity, pp 148-168.
- Wardhani, Baiq L.S.W., 2010. *Globalisasi dan Konflik Etnis*. Surabaya: CSGS Publisher.
- _____, 2011. *Identitas, Etnik, dan Konflik, Tantangan di Era Kontemporer*. Surabaya: CSGS Publisher.
- Weitzman, Bruce Maddy, 2011. *The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States*. Austin: University of Texas Press.
- Woodward, Kathryn, 1997. "Concept of Identity and Difference", dalam Woodward, Kathryn (ed.), *Identity and Difference*. London: Sage Publications, pp. 7-63.

Artikel dan Jurnal

- Almasude, Amar, 1999. "The New Mass Media and the Shaping of Amazigh Identity", dalam Reyhner, Jon et, al. (ed.), 1999. *Revitalizing Indigenous People*. Northern Arizona University.
- Bengio, Ofra & Bruce Maddy-Weitzman, 2013. "Mobilised diasporas: Kurdish and Berber movements in comparative perspective". *Kurdish Studies*, 1 (1), pp. 65 - 90.
- Cornwell, Graham Hough & Andrea Smith, 2010. "Ancient Modernity and Amizighité: Reimagining The Moroccan National Identity". *The Institute For Middle East Studies The Elliott School Of International Affairs The George Washington University*.
- Crawford, David, dan Katherine E. Hoffman, "Essentially Amazigh:Urban Berbers and the Global Village", dalam Lacey, Kevin (ed.). *The Arab-African and Islamic World: Interdisciplinary Studies*. New York: Peter Lang, pp. 117-130.

- El-Aissati, Abderrahman, 2005. "A Socio-Historical Perspective on The Amazigh (Berber) Cultural Movement In North Africa". *Afrika Focus*, 18, (1-2), pp. 59-72.
- Lauermaun, John, 2009. "Amazigh Nationalism in the Maghreb". *The Geographical Bulletin*, 50. Gamma Theta Upsilon, pp. 37-55.
- Masbah, Mohammed, 2011. "The Amazigh in Morocco: Between the Internal and the External", dalam *Arab Center for Research & Policy Studies*.
- Saideman, Stephen M., 2002. "Discrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups", dalam *Department of Political Science, Texas Tech University Journal of Peace Research* 2002; 39; 27.
- Tsutsui, Kiyoteru, 2004. "Global Civil Society and Ethnic Social Movements in the Contemporary World", dalam *Sociological Forum*, 19 (1), pp. 63-87.
- Wang, Yi, 2007. "Globalization Enhances Cultural Identity", dalam *Intercultural Communication Studies*, XVI (1), pp. 83-86.

Disertasi

- Karrouche, Norah Fatima Flora, 2013. *Memories From The Rif: Moroccan-Berber Activists Between History and Myth*. Disertasi. Rotterdam : Erasmus University Rotterdam.

Situs Internet

- CERD. 2013. *UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention : concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination : Morocco, 13 September 2010, CERD/C/MAR/CO/17-18, [online], dalam <http://www.refworld.org/docid/4d2c5f112.html> [diakses 19 Januari 2014]*
- El Amraoui, Ahmed, 2007. *Berber Language Gets an Airing*, [online] dalam <http://www.aljazeera.com/focus/moroccoelections2007/2007/09/200852519232557319.html> [diakses 1 Oktober 2013]
- El Kaidi, Youssef, 2013. *Morocco: Ministry of Interior to lift its ban on Amazigh names*, [online] dalam <http://www.moroccoworldnews.com/2013/04/88654/morocco>

- ministry-of-interior-to-lift-its-ban-on-amazigh-names-2/
[diakses 2 Oktober 2013]
- HRW, 2004. Human Rights Watch October 2004 Vol. 16, No. 6(E). *MOROCCO: Human Rights at a Crossroads*, dalam <http://www.hrw.org/reports/2004/morocco1004/morocco1004.pdf> [diakses 27 Februari 2014]
- HRW, 2009. *Human Rights in Morocco and Western Sahara*, [online], dalam <http://www.hrw.org/world-report-2009/moroccowestern-sahara> [diakses 7 Maret 2014]
- IFHR. 2001. *Resolution concerning the Amazigh language and culture*, [online], dalam <http://www.mondeberbere.com/societe/fidhen.htm> [diakses 22 Februari 2014]
- ILO & ACHPR, 2009. *Morocco : constitutional, legislative and administrative provisions concerning indigenous peoples/ International Labour Office - Geneva: ILO, 2009* [online], dalam http://www1.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/country_reports/Country_reports_Morocco.pdf [diakses 27 Februari 2014]
- IPACC, 2007. *Regional North Africa, Background and ethnic overview*, [online], dalam http://www.ipacc.org.za/eng/regional_northafrica.asp [diakses 2 Januari 2014]
- IWGIA & ACHPR, 2001. *Indigenous Peoples In Africa: The Forgotten Peoples ? The African Commission's work on indigenous peoples in Africa*, [online], dalam http://www.achpr.org/files/special-mechanisms/indigenous-populations/achpr_wgip_report_summary_version_eng.pdf [diakses 16 Januari 2014]
- Magharebia, 2010. *UN report supports Moroccan Amazigh objectives*, [online], dalam http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2010/09/14/feature-02 [diakses 4 Januari 2014]
- Morocco News Tribune, 2013. *Morocco Lifts a Ban on Amazigh Names*, [online], dalam <http://morocconewstribune.com/morocco-lifts-a-ban-on-amazigh-names/> [diakses 20 Januari 2014]
- Prengaman, Peter, 2001. *Morocco's Berbers Battle to Keep From Losing Their Culture / Arab minority forces majority to abandon native language*, [online], dalam <http://www.sfgate.com/news/article/Morocco-s-Berbers-Battle-to-Keep-From-Losing-2941557.php> [diakses 3 Oktober 2013]
- Shelton, Dinah, 2002. *Protecting Human Rights In A Globalized World*, Journal Boston College International & Comparative Law

- Review, 25 (2), [online], dalam http://www.bc.edu/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bciclr/25_2/06_FMS.htm [diakses 14 Desember 2013]
- Tazzla Institute for Cultural Diversity, 2013, *Homepage Tazzla Institute*, [online], dalam <http://www.tazzla.org/id1.html> [diakses Desember 2013]
- Temehu, 2013, *Berberism & Berber Political Movements*, [online], dalam <http://www.temehu.com/imazighen/berberism.htm> [diakses 1 Desember 2013]